

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA



**PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
MELALUI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
KEUANGAN DI WEB**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Ketua/Anggota Tim

1. LILIS SETYOWATI, SE (0607018703)
2. PURWANTORO, SE., M.Si., Akt (0623067403)

Dibiayai oleh:

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Sesuai dengan

**Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Pemula Bagi Dosen
Perguruan Tinggi Swasta**

Antara Ditjen Dikti dengan Kopertis Wilayah VI

Nomor: 225/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013

Antara Kopertis Wilayah VI dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Nomor: 023/SP2H/KL/KOPERTIS6/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013

**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
DESEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Melalui Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Web

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : LILIS SETYOWATI

NIDN : 0607018703

Jabatan Fungsional :

Program Studi : Akuntansi

Nomor HP :

Surel (e-mail) : lilis_setyowati7@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : PURWANTORO

NIDN : 0623067403

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 10.000.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp. 14.992.000,00

Mengetahui
Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Agus Prayitno)

NIP/NIK 0686.11.1992.024

Semarang, 2 - 12 - 2013,
Ketua Peneliti

(LILIS SETYOWATI)

NIP/NIK0686.11.2010.388

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Tyas Catur Pamudi, S.Si., M.Kom)

NIP/NIK 0686.11.1993.041

RINGKASAN

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD yang menyajikan informasi mengenai laporan kinerja keuangan secara online di website. Dengan adanya layanan informasi keuangan ini yang bisa diakses oleh masyarakat, hal ini menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai peranan teknologi informasi dalam membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui akuntabilitas dan transparansi keuangan di situs web.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode survey dengan cara penyebaran kuesioner kepada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang merupakan variabel independen, dan standar akuntansi pemerintahan merupakan variabel dependen. Uji analisis atas penelitian ini menggunakan alat uji regresi linear berganda dan software yang digunakan untuk menguji penelitian ini menggunakan program SPSS.

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 16,0 menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (hasil uji t sebesar $0,922 > \text{sig } 0,005$). (2) transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (hasil uji t sebesar $0,178 > \text{sig } 0,05$). (3) pengawasan berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (hasil uji t sebesar $00,008 < \text{sig } 0,05$). (4) akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (hasil uji F sebesar $0,002 < 0,05$).

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Standar Akuntansi Pemerintahan

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat. Inayah, Taufik dan HidayahNya sehingga kami dapat melaksanakan penelitian ini dan menyusun laporan akhir ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.

Harapan kami semoga laporan penelitian ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Penelitian ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, Desember 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.4 LUARAN PENELITIAN	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 AKUNTABILITAS	4
2.2 TRANSPARANSI	5
2.3 PENGAWASAN	6
2.4 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	7
2.5 HIPOTESIS PENELITIAN	8
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
3.1 TUJUAN PENELITIAN.....	9
3.2 MANFAAT PENELITIAN	9
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	10
4.1 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL.....	10
4.1.1 VARIABEL PENELITIAN	10
4.1.2 DEFINISI OPERASIONAL.....	10
4.2 JENIS DAN SUMBER DATA.....	13
4.3 METODE PENGUMPULAN DATA	14
4.4 MODEL ANALISIS	14

BAB 5	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
5.1	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	19
5.1.1	GAMBARAN UMUM RESPONDEN	19
5.1.2	KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	19
5.1.3	KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA	20
5.1.4	KARAKTERISTIK REESPONDEN BERDASARKAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENDIDIKAN PELATIHAN TENTANG KEUANGAN DAERAH.....	20
5.2	STATISTIK DESKRIPTIF.....	21
5.2.1	VARIABEL AKUNTABILITAS.....	21
5.2.2	VARIABEL TRANSPARANSI.....	22
5.2.3	VARIABEL PENGAWASAN.....	23
5.2.4	VARIABEL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.	24
5.3	ANALISIS DATA KUANTITATIF	25
5.3.1	UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	25
5.3.2	UJI NORMALITAS	28
5.3.3	UJI MULTIKOLINIERITAS.....	29
5.3.4	UJI HETEROSKEDASTISITAS	30
5.3.5	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	31
5.3.6	ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI.....	33
5.4	PEMBAHASAN	34
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
6.1	KESIMPULAN.....	36
6.2	SARAN.....	36
	DAFTAR PUSTAKA	37
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden	19
Tabel 5.2	Usia Responden	20
Tabel 5.3	Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah	20
Tabel 5.4	Tanggapan Responden tentang Variabel Akuntabilitas	21
Tabel 5.5	Tanggapan Responden tentang Transparansi	22
Tabel 5.6	Tanggapan Responden tentang Pengawasan	23
Tabel 5.7	Tanggapan Responden tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ...	24
Tabel 5.8	Uji Validitas Variabel Akuntabilitas.....	25
Tabel 5.9	Uji Validitas Variabel Transparansi	26
Tabel 5.10	Uji Validitas Variabel Pengawasan	26
Tabel 5.11	Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan	27
Tabel 5.12	Uji Reliabilitas Variabel	28
Tabel 5.13	Uji Multikolinieritas	29
Tabel 5.14	Hasil Uji Glejser	31
Tabel 5.15	Koefisien Regresi.....	31
Tabel 5.16	Hasil Uji F	33
Tabel 5.17	Koefisien Determinasi	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran	10
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas	28
Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas	30

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner

Tabulasi Data

Laporan Penggunaan Dana

Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan, yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pimpinan daerah yaitu Gubernur/ Bupati/ Walikota harus menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 tahun 2010).

Akuntabilitas pelaporan negara masih banyak memerlukan perbaikan sebagaimana ditandai dengan masih belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dewasa ini perkembangan sektor publik di Indonesia semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi sektor publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2005).

Warga Indonesia semakin menyadari kebutuhan untuk mendukung badan sektor publik dengan sistem manajemen yang efektif dan efisien untuk merasionalisasi penggunaan sumber daya keuangan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian, transparansi informasi diperlukan dalam hal keuangan pemerintah sehingga akuntabilitas pemerintah dapat difasilitasi dan warga Indonesia mengetahui tentang proses pengambilan keputusan. Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan, maka perlu adanya pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja

sudah dilaksanakan dan dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang meliputi akuntabilitas, dan transparansi, dan pengawasan di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi menyebutkan pertukaran informasi dapat menembus batas administrasi negara, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian penyampaian dan respon terhadap suatu informasi sudah dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Teknologi informasi ini mempengaruhi setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan salah satunya termasuk pelaksanaan tugas pengawasan yang diemban oleh Dinas Pendidikan. Dengan berpacu waktu dan kualitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dinas pendidikan membuat website dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan sebagai media

tukar menukar informasi antar Dinas, Bawasda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Instansi lainnya dan masyarakat. Adanya Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) online di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Dinas Pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah akuntabilitas pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
2. Apakah transparansi pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
3. Apakah pengawasan keuangan di Dinas Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap Standar Akuntansi Pemerintah
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah
3. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

1.4. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu Publikasi jurnal ber ISSN

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP, 2010). Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2005).

Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Tiga dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaan tersebut bersifat temporer karena mandat pemilu sangat tergantung pada hasil pemilu yang dilakukan pada interval waktu tertentu.

2. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, miss-management, atau korupsi.

3. Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas administratif yaitu kewajiban untuk menjalankan tugas yang diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara.

Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu, tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Mereka dipercaya untuk mengelola sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Dalam kenyataan, saat ini pertanggungjawaban keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada legislatif dapat dikatakan belum memenuhi unsur – unsur akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2.2 Transparansi

Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan (SAP, 2010). Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi sepuluh (10) elemen, yaitu: (a) manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, (b) prosedur pelayanan, (c) persyaratan teknis dan administratif pelayanan, (d) rincian biaya pelayanan, (e) waktu penyelesaian pelayanan, (f) pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, (g) lokasi pelayanan, (h) janji pelayanan, (i) standar pelayanan publik, dan (j) informasi pelayanan.

2.3 Pengawasan

Untuk mendeteksi bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik, termasuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana telah ditetapkan diperlukan media tertentu salah satu media yang dipandang relevan adalah pengawasan internal dan eksternal. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah pengawasan internal merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dijalankan eksekutif untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Siegel menegaskan bahwa pengendalian anggaran dapat dilakukan oleh dua kelompok yaitu: (1) pengendalian yang dilakukan oleh legislatif, dan (2) pengendalian yang dilakukan oleh eksekutif.. hal ini menandakan pengawasan internal yang dilaksanakan untuk menjamin efektifitas penggunaan anggaran. Sistem pengendalian internal setiap unit sulit dilaksanakan karena hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kompleks. Fokus utama sub sistem pengawasan keuangan adalah para perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi, bukan pada mesin atau peralatan yang digunakan, karena pengawasan keuangan yang baik dapat menekankan perilaku manusia yang cenderung melakukan penyimpangan atau kecurangan.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun oleh komite standar yang independen ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pembentukan, susunan, kedudukan keanggotaan dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) ditetapkan dengan keputusan presiden (UU No.1 tahun 2004 pasal 57). KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut (pengantar SAP). Unsur yang membentuk KSAP adalah unsur Departemen Keuangan, unsur Departemen Dalam Negeri dan unsur dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang

berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
4. Pemerintah.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan konsep yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Hipotesis 2 : Variabel transparansi pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Hipotesis 3 : Variabel pengawasan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap Standar Akuntansi Pemerintah
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

3.2 Manfaat Penelitian

^ Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pada sektor publik
2. Masyarakat, dapat menambah wacana mengenai peranan teknologi informasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan di Dinas Provinsi Jawa Tengah

BAB 4

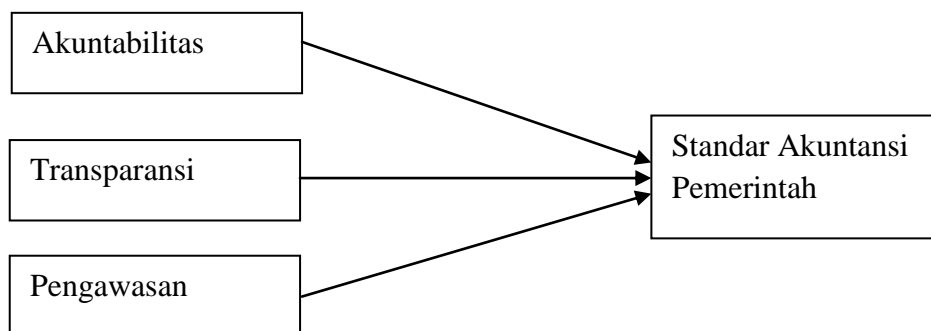
METODE PENELITIAN

4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sebagai variabel independen dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel dependen.

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Kerangka Pemikiran

4.1.2 Definisi Operasional

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP, 2010).

Akuntabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang terdiri dari 11 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima) point skala likert yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Renstrada dan Arah Kebijakan Umum APBD merupakan Dasar dalam pengelolaan APBD
- b. Tahapan Pengelolaan APBD melibatkan semua unsur-unsur masyarakat.
- c. Pengelolaan APBD disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.
- d. Kepentingan public dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan APBD

- e. APBD merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.
- f. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD
- g. Proses dan pertanggung jawaban APBD diawasi secara terus menerus.
- h. Penyajian APBD telah menyertakan informasi masa lalu
- i. Dalam mengevaluasi APBD hanya memperbadingkan dengan realisasi /sesungguhnya
- j. Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal)
- k. Jaminan pengelolaan APBD merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan APBD

2. Transparansi

Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarakan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP, 2010).

Transparansi ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang terdiri dari 10 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima) point skala likert yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Pengumuman pengelolaan APBD kepada masyarakat dapat meningkatkan tranparansi
- b. Informasi yang di berikan kepada public selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan pengeloan transparansi anggaran
- c. Akses untuk memperoleh dokumen pulik tentang APBD mudah diperoleh
- d. Akses untuk memperoleh dokumen pulik tentang APBD sulit diperoleh karena birokratis
- e. Meskipun suara rakyat/usulan rakyat diakomodasi melalui musrembang, transparansi publik tentang APBD tetap di manipulasi
- f. Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi APBD
- g. Laporan pertanggung jawaban tahunan APBD selalu tepat waktu
- h. Transparansi APBD dapat mengakkomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat

- i. Pengumuman tentang APBD bisa didapat setiap waktu
- j. Pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan oleh publik

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dijalankan eksekutif untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang terdiri dari 11 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima) point skala likert yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Peran penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD.
- b. Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan APBD
- c. Pengawasan APBD dilakukan secara internal dan eksternal
- d. Pengawasan pengelolaan APBD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara rutin
- e. Pimpinan atau atasan langsung secara rutin menilai kinerja bawahan pengguna APBD
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif mengawasi mekanisme pengelolaan APBD
- g. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan APBD preventif dan repressif
- h. DPRD secara aktif melakukan pengawasan pengelolaan anggaran dengan menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan.
- i. Revisi anggaran dilakukan dengan alasan skala prioritas

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun oleh komite standar yang independen ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar akuntansi pemerintah ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang terdiri dari 10 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima)

point skala likert yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
- b. Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD menyusun laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- c. Wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah.
- d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD selalu dilaksanakan tepat waktu.
- e. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.
- f. Dalam reformasi system akuntansi pemerintahan, system pencatatan tunggal (single entry system) dirubah menjadi system ganda (double entry sytem)
- g. Dalam reformasi system akuntansi pemerintahan, pencatatan atas dasar kas (cash-basis) dirubah menjadi atas dasar actual (modified accrual basis)
- h. Tujuan penerapan akuntansi, menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD.
- i. Laporan keuangan pemerintah disusun netral atau informasi diarahkan pada kebutuhan umu dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah subyek opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek peneliti atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sedangkan sumber datanya adalah primer dari jawaban kuesioner responden secara langsung yang akan dikirim kepada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna laporan kinerja keuangan pemerintahan.

Sampel

Sampel menurut Indriantoro dan Supomo (2002) adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan proses tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode slovin (Sevilla et. al., 2007).

$$n = N/[N(e)^2 + 1]$$

dimana,

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Batas toleransi kesalahan (error tolerance), nilai presisi 95% atau sig. =0.05

Berdasarkan kriteria di atas didapatkan data sebanyak 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Karyawan bagian keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sehingga dengan menggunakan metode slovin (batas toleransi 0,05) maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan instrumen kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum, yaitu demografi responden. Bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan.

Kuesioner diberikan secara langsung. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya diambil langsung oleh peneliti. Kuesioner yang telah diisi oleh responden diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis.

4.4 Model Analisis

Supaya data yang diperoleh bermanfaat, maka diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif:

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dalam penelitian ini merupakan analisis yang berdasarkan data jawaban responden yang masih berupa angka-angka dan kemudian dinyatakan dalam bentuk uraian prosa sehingga diperoleh gambaran tanggapan responden.

2. Analisis Kuantitatif

Metode analisis kuantitatif merupakan analisis yang lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh (Husein Umar, 1998). Adapun tahapan dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisa data menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan pengecekan dengan melakukan plot data untuk melihat adanya data linear atau tidak linear. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda karena menggunakan satu variabel dependen standar akuntansi pemerintah (Y) dan tiga variabel independen akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan pengawasan (X_3). Hipotesis $H_1 - H_5$ menggunakan uji regresi dengan tingkat korelasi sebesar 5%. H_0 diterima apabila probabilitasnya signifikan $<0,05$.

Adapun rumus persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

X_1 : Akuntabilitas

X_2 : Transparansi

X_3 : Pengawasan

Y : Standar Akuntansi Pemerintah

a : Konstan

e : Galat (*error terms*)

b. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menguji dalam sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas, dapat melihat grafik Normal P-P *plot of Regression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2001).

Dasar pengambilan keputusan antara lain: (1) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model memenuhi asumsi normalitas, serta (2) jika data mentebat jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Santoso (2000) menyatakan bahwa deteksi adanya miltikolinearitas dibagi menjadi 2 yaitu: (a) besaran VIF dan *Tolerancei*. Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah mempunyai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai nilai *Tolerance* mendekati 1, serta (b) besaran korelasi antar variabel independen. Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah koefisien antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5).

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain terjadi ketidaksamaan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah di *studendized* (Santoso, 2001).

Dasar pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gujarati 2003 menyatakan bahwa deteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan residual. Jika hasil uji Glejser tidak signifikan, maka model regresi tersebut bebas heteroskedstisitas.

Uji Validitas

Validitas adalah suatu yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevaliditasan suatu instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Signifikan yang digunakan adalah (α) yaitu:

- a. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$), maka pengujian tersebut dinyatakan valid
- b. Apabila r hitung lebih kecil dari r tabel ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$), maka pengujian tersebut dinyatakan tidak valid

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau *alpha* sebesar: (a) $< 0,6$ tidak reliabel, (b) $0,6 - 0,7$ baik, (c) $0,7 - 0,8$ baik, dan (d) $> 0,8$ sangat baik (Sekaran, 2003).

Uji Hipotesa

Tujuan pengujian hipotesis yaitu untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data. Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t dan statistik F:

- a. Uji Statistik t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_1) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

Artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga bila $\alpha < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima.

b. Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_0 = \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga apabila $\alpha < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Objek Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden menunjukkan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan diri responden secara individual. Gambaran umum responden akan memberikan diskripsi mengenai keadaan dari responden yang didistribusikan pada anggota DPR dan karyawan Dinas Pendidikan yang semula berjumlah 100 kuesioner dan kembali semua. Dari kuesioner yang kembali hanya sebanyak 98 kuesioner yang terisikan lengkap semua data diri responden dan daftar pertanyaannya. Dan 2 lainnya belum terjawab lengkap daftar pertanyaannya.

5.1.2 Karakteristik Responden Berdasrkan Jenis Kelamin

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik responden berdasrkan jenis kelamin yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki - laki	51	52,0 %
Perempuan	47	48,0 %
	98	100 %

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 51 orang atau 52,0% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 47 orang atau 48,0%.

5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik responden berdasarkan usia yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Usia Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
≤ 30 tahun	0	0%
31 – 40 tahun	18	18,4%
41 – 50 tahun	48	49,0%
≥ 51 tahun	32	32,6%
	98	100 %

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa sebagian besar responden berusia 41-50 tahun sebanyak 48 orang atau 49,0% responden yang berusia ≥ 51 tahun sebanyak 32 orang atau 32,6% dan yang berusia 31-40 tahun sebanyak 18 orang atau 18,4%.

5.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik responden berdasarkan keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Diklat	Jumlah	Prosentase
Belum Pernah	0	0%
1 kali	1	1%
2 – 3 kali	9	9,2%
4 kali atau lebih	88	89,8%
	98	100%

Berdasarkan tabel 5.3 terlihat bahwa sebagian besar responden sering terlibat keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan yaitu sebanyak 88 orang atau 89,8%, 2-3 kali yang terlibat keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan tentang keuangan

daerah sebanyak 9 orang atau 9,2% dan hanya 1 orang atau 1% yang hanya 1 kali mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang keuangan daerah.

5.2 Statistik Deskriptif

5.2.1 Variabel Akuntabilitas

Akuntabilitas diukur dengan 5 skala likert yang dibagi menjadi 11 pertanyaan. Hasil jawaban dari 98 responden mengenai akuntabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4

Tanggapan Responden tentang Variabel Akuntabilitas

No	Indikator	Perhitungan											
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		setuju		sangat setuju		Jml	
1.	Renstrada dan arah kebijakan umum APBD mrp dasar dlm pengelolaan APBD	0	0%	0	0%	0	0%	33	33,7%	65	66,3%	98	100%
2.	Tanggapan pengelolaan APBD melibatkan semua unsur masyarakat	0	0%	0	0%	0	0%	38	38,8%	60	61,2%	98	100%
3.	Pengelolaan APBD disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kpd masy	0	0%	0	0%	2	2,0%	42	42,9%	54	55,1%	98	100%
4.	Kepentingan publik dan gol mjd perhatian dan pertimbangan pengelolaan APBD	0	0%	0	0%	1	1,0%	38	38,8%	59	60,2%	98	100%
5.	APBD mrp dokumen rahasia shg masy tdk perlu tahu	1	1,0%	2	2,0%	3	3,1%	34	34,7%	58	59,2%	98	100%
6.	Indikator hasil kinerja yg akan dicapai ditetapkan dan digunakan utk mengevaluasi pengelolaan APBD	0	0%	0	0%	0	0%	39	39,8%	59	60,2%	98	100%
7.	Proses dan pertanggungjawaban APBD diawasi terus	0	0%	0	0%	1	1,0%	35	35,7%	62	63,3%	98	100%
8.	Penyajian APBD menyertakan informasi masa lalu	0	0%	0	0%	0	0%	36	36,7%	62	63,3%	98	100%
9	Dlm evaluasi APBD hanya membandingkan dg realisasi	0	0%	0	0%	0	0%	39	39,8%	59	60,2%	98	100%

10	Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kpd otoritas lbh tinggi dan masy luas	0	0%	0	0%	0	0%	42	42,9%	56	57,1%	98	100%
11	Jaminan pengelolaan APBD mrp kepatuhan thp hukum	0	0%	0	0%	0	0%	42	42,9%	56	57,1%	98	100%

5.2.2 Variabel Transparansi

Transparansi diukur dengan 5 skala likert yang dibagi menjadi 10 item pertanyaan. Hasil jawaban dari 98 responden mengenai transparansi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Tanggapan Responden tentang Transparansi

No	Indikator	Perhitungan											
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		setuju		sangat setuju		Jml	
1.	Pengumuman pengelolaan APBD kpd masy dpt meningkatkan transparansi	0	0%	0	0%	0	0%	22	22,4%	76	77,6%	98	100%
2.	Inf yg diberikan kpd publik spt meningkatkan transparansi	1	1,0%	0	0%	0	0%	42	42,9%	55	56,1%	98	100%
3.	Dok publik ttg APBD mudah diperoleh	1	1,0%	0	0%	0	0%	44	44,9%	53	54,1%	98	100%
4.	Dok publik ttg APBD sulit diperoleh krn birokratis	0	0%	1	1,0%	1	1,0%	43	43,9%	53	54,1%	98	100%
5.	Transparansi publik ttg APBD ttp manipulasi meskipun tih melakukan musrenbang	1	1,0%	1	1,0%	2	2,0%	41	41,8%	53	54,1%	98	100%
6.	Musrenbang dpt mrningkatkan kebijakan transparansi APBD	0	0%	0	0%	0	0%	43	43,9%	55	56,1%	98	100%
7.	Lap pertanggungjawaban APBD selalu tpt waktu	0	0%	0	0%	1	1,0%	41	41,8%	55	56,1%	98	100%
8.	Transparansi APBD dpt meningkatkan susulan rakyat	0	0%	0	0%	2	2,0%	37	37,8%	59	60,2%	98	100%
9	Pengumuman ttg APBD bisa didapat setiap waktu	0	0%	0	0%	2	2,0%	39	39,8%	0	0%	98	100%
10	Pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan oleh publik	0	0%	0	0%	1	1,0%	33	33,7%	64	65,3%	98	100%

5.2.3 Variabel Pengawasan

Pengawasan diukur dengan 5 skala likert yang dibagi menjadi 9 pertanyaan. Hasil jawaban dari 98 responden mengenai pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6
Tanggapan Responden tentang Pengawasan

No	Pertanyaan	Perhitungan											
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu - ragu		setuju		sangat setuju		Jml	
1.	Peran penuh dlm memberikan masukan penyusunan APBD	0	0%	0	0%	3	3,1%	54	55,1%	41	41,8%	98	100%
2.	Aspirasi masy mjd dasar dlm rangka penyusunan APBD	0	0%	0	0%	9	9,2%	59	60,2%	30	30,6%	98	100%
3.	Pengawasan APBD dilakukan scr internal dan eksternal	0	0%	1	1,0%	3	3,1%	61	62,2%	33	33,7%	98	100%
4.	Pengawasan pengelolaan APBD dilakukan oleh APIP secara rutin	0	0%	1	1,0%	2	2,0%	50	51,0%	45	45,9%	98	100%
5.	Pinjaman scr rutin menilai kinerja bawahan	0	0%	1	1,0%	1	1,0%	41	41,8%	55	56,1%	98	100%
6.	DPRD scr aktif mengawasi mekanisme pengelolaan APBD	0	0%	0	0%	2	2,0%	39	39,8%	57	58,2%	98	100%
7.	Pengawasan yg dilakukan oleh DPRD thp pengelolaan APBD preventip dan repretip	0	0%	0	0%	2	2,0%	45	45,9%	51	52,0%	98	100%
8.	DPRD scr aktif melakukan pengawasan pengelolaan angg dg menugaskan BPK	0	0%	0	0%	6	6,1%	61	62,2%	31	31,6%	98	100%
9	Revisi angg dilakukan dg alasan scr prioritas	0	0%	0	0%	5	5,1%	61	62,2%	32	32,7%	98	100%

5.2.4 Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diukur dengan 5 skala likert yang terbagi menjadi 10 item pertanyaan. Hasil jawaban dari 98 responden mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7

Tanggapan Responden tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Pertanyaan	Perhitungan											
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		setuju		sangat setuju		Jml	
1.	SAP mrp persyaratan yg mempunyai kekuatan hukum dlm upaya meningkatkan kualitas lap keu pem	0	0%	0	0%	1	1,0%	53	54, 1%	44	44, 9%	98	100 %
2.	Pejabat penata usaha keuangan SKPD menyusun lap keu	0	0%	0	0%	0	0%	42	42, 9%	56	57, 1%	98	100 %
3.	Wujud transparansi dan akuntabilitas adl penyampaian lap keu pertanggungjawaban	0	0%	0	0%	1	1,0%	43	43, 9%	54	55, 1%	98	100 %
4.	Lap pertanggungjwbn APBD sll tpt waktu	0	0%	0	0%	0	0%	42	42, 9%	56	57, 1%	98	100 %
5.	Informasi akuntansi pemerintah disajikan selengkap mungkin	0	0%	0	0%	1	1,0%	51	52, 0%	46	46, 9%	98	100 %
6.	Reformasi sistem akt pemerintahan, sistem pencatatan tunggal diubah mmjd sistem ganda	0	0%	0	0%	1	1,0%	52	53, 1%	45	45, 9%	98	100 %
7.	Dlm reformasi sistem akt pemerintahan, pencctn atas dasar kas diubah menjadi dasar aktual	0	0%	0	0%	1	1,0%	47	48, 0%	50	51, 0%	98	100 %
8	Tujuan penerapan akt, menekankan peranan angg dlm siklus perencanaan, pengendalian dan pertanggungjwbn pengelolaan APBD	0	0%	0	0%	2	2,0%	46	46, 9%	50	51, 0%	98	100 %
9	Lap keu pemerintah disusun netral	0	0%	0	0%	1	1,0%	41	41, 8%	56	57, 1%	98	100 %

5.3 Analisis Data Kuantitatif

5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk untuk mengukur sah atau valid tudaknya suatu kuesioner. Di bawah ini dijelaskan valid tidaknya kuesioner.

Tabel 5.8

Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,170	0,409	Valid
2	Pertanyaan 2	0,170	0,446	Valid
3	Pertanyaan 3	0,170	0,430	Valid
4	Pertanyaan 4	0,170	0,454	Valid
5	Pertanyaan 5	0,170	0,204	Valid
6	Pertanyaan 6	0,170	0,396	Valid
7	Pertanyaan 7	0,170	0,393	Valid
8	Pertanyaan 8	0,170	0,458	Valid
9	Pertanyaan 9	0,170	0,449	Valid
10	Pertanyaan 10	0,170	0,422	Valid
11	Pertanyaan 11	0,170	0,309	Valid

Berdasarkan Tabel 5.8 diketahui bahwa uji validitas variabel akuntabilitas hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua hasil r hitung pada indikator akuntabilitas dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel transparansi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Uji Validitas Variabel Transparansi

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,170	0,369	Valid
2	Pertanyaan 2	0,170	0,403	Valid
3	Pertanyaan 3	0,170	0,446	Valid
4	Pertanyaan 4	0,170	0,471	Valid
5	Pertanyaan 5	0,170	0,444	Valid
6	Pertanyaan 6	0,170	0,440	Valid
7	Pertanyaan 7	0,170	0,323	Valid
8	Pertanyaan 8	0,170	0,407	Valid
9	Pertanyaan 9	0,170	0,401	Valid
10	Pertanyaan 10	0,170	0,438	Valid

Berdasarkan pada Tabel 5.9 diketahui bahwa uji validitas indikator transparansi hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua hasil r hitung pada indikator melebihi r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada variabel transparansi dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel pengawasan ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10
Uji Validitas Variabel Pengawasan

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,170	0,511	Valid
2	Pertanyaan 2	0,170	0,496	Valid
3	Pertanyaan 3	0,170	0,403	Valid
4	Pertanyaan 4	0,170	0,465	Valid
5	Pertanyaan 5	0,170	0,456	Valid
6	Pertanyaan 6	0,170	0,329	Valid
7	Pertanyaan 7	0,170	0,291	Valid
8	Pertanyaan 8	0,170	0,364	Valid
9	Pertanyaan 9	0,170	0,370	Valid

Berdasarkan Tabel 5.10 diketahui bahwa uji validitas indikator pengawasan hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua nilai r hitung pada indikator melebihi r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada pengawasan dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11

Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,170	0,382	Valid
2	Pertanyaan 2	0,170	0,300	Valid
3	Pertanyaan 3	0,170	0,311	Valid
4	Pertanyaan 4	0,170	0,230	Valid
5	Pertanyaan 5	0,170	0,298	Valid
6	Pertanyaan 6	0,170	0,335	Valid
7	Pertanyaan 7	0,170	0,322	Valid
8	Pertanyaan 8	0,170	0,326	Valid
9	Pertanyaan 9	0,170	0,267	Valid

Berdasarkan Tabel 5.11 diketahui bahwa uji validitas indikator Standar Akuntansi Pemerintahan hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua nilai hasil r hitung pada indikator melebihi nilai r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dilakukan perhitungan selanjutnya.

2. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Reliabel atau tidaknya suatu kuesioner dilihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan, apakah stabil atau konstan. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.

Tabel 5.12
Uji Reliabilitas Variabel

No	Indikator Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Standarisasi	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,835	0,6	Reliabel
2.	Transparansi	0,811	0,6	Reliabel
3.	Pengawasan	0,816	0,6	Reliabel
4.	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,757	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.12 diatas dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas, nilai *cronbach alpha* sebesar $0,835 >$ dari nilai standarisasi 0,6. Kemudian pada variabel transparansi *cronbach alpha* sebesar $0,811 >$ 0,6. Pada variabel pengaawasan nilai *cronbach alpha* sebesar $0,816 >$ 0,6. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai nilai *cronbach alpha* sebesar $0,757 >$ 0,6. Oleh karena itu varaibel akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dikatakan reliabel karena mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih besar dari nilai standarisasi sebesar 0,6.

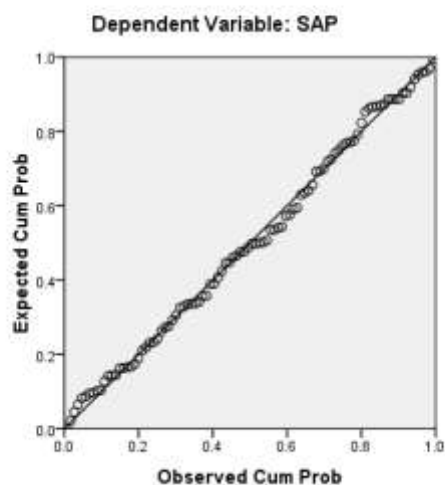
5.3.2 Uji Normalitas

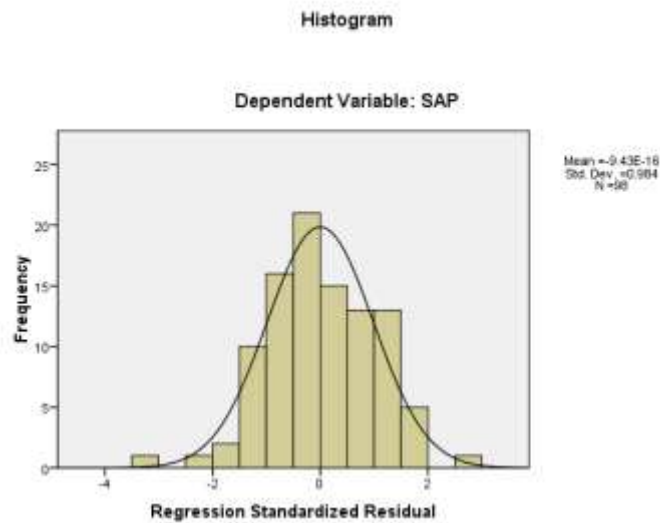
Uji normalitas menggunakan grafik *Normal P-P Plot* dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagoal dari grafik. Berikut hasil pengujian normalitas:

Gambar 5.1

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pada grafik normal plot titik – titik menyebar di sekitar dan searah garis diagonal dan pada grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang menceng ke kiri dan tidak normal, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

5.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menggunakan besaran *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Adanya multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai *VIF* < 10. Di bawah ini adalah hasil perhitungan melalui SPSS:

Tabel 5.13
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.914	4.858		5.746	.000		
	Akuntabilitas	.009	.090	.011	.098	.922	.767	1.304
	Transparansi	.125	.092	.151	1.356	.178	.735	1.361
	Pengawasan	.256	.094	.292	2.731	.008	.793	1.260

a. Dependent Variable: SAP

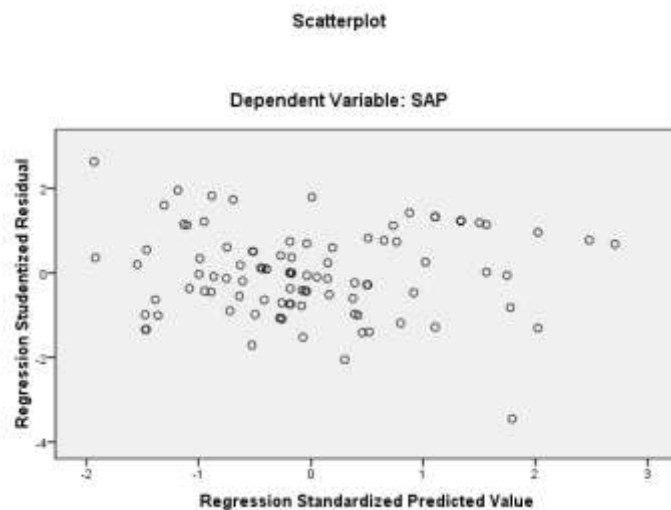
Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance (0,767; 0,735; 0,793) > 0,10 dan nilai VIF (1,304; 1,361; 1,260) < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan ini terbebas dari problem multikolinieritas.

5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Hasil grafik scatterplot adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada pengujian ini tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari titik - titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu.

Tabel 5.14
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.481	2.941		-.164	.870
Akuntabilitas	.004	.055	.008	.071	.944
Transparansi	.000	.056	-.001	-.010	.992
Pengawasan	.056	.057	.113	.986	.327

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil uji Glejser pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan mempengaruhi absolut residual dengan tingkat signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan persamaan regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

5.3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

1. Koefisien Regresi

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.15
Koefisien Regresi

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	27.914	4.858		5.746	.000		
Akuntabilitas	.009	.090	.011	.098	.922	.767	1.304
Transparansi	.125	.092	.151	1.356	.178	.735	1.361
Pengawasan	.256	.094	.292	2.731	.008	.793	1.260

a. Dependent Variable: SAP

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 27,914 + 0,009X_1 + 0,125X_2 + 0,256X_3 + e$$

2. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t. Nilai t-tabel dengan jumlah observasi 98, variabel bebas 5 dan $\alpha=5\%$ sebesar 1,987. Dari hasil pengujian didapat nilai t hitung sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

dari hasil estimasi variabel akuntabilitas diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,098 < t_{tabel} = 1,987$ dengan signifikansi sebesar $0,922 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan dengan adanya akuntabilitas yang tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan semakin lebih baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah disajikan di web ditolak.

b. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 5.15, untuk variabel transparansi diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,356 < t_{tabel} = 1,987$ dengan signifikansi sebesar $0,178 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa adanya transparansi keuangan kepada publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan semakin lebih baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah disajikan di web ditolak.

c. Pengujian Hipotesis 3

dari hasil estimasi variabel kemandirian diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,731 > t_{tabel} = 1,987$ dengan signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dalam pengelolaan keuangan di Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan di web diterima.

3. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F_{tabel} dengan $n = 98$, variabel bebas = 3 dan $\alpha=5\%$ adalah sebesar 2,75. Dari pengujian simultan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.16

Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.294	3	40.431	5.425	.002 ^a
	Residual	700.624	94	7.453		
	Total	821.918	97			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: SAP

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai $F_{\text{hitung}} = 5,425 > F_{\text{tabel}} = 2,75$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.3.6 Analisis Koefisien Determinasi

Untuk menguji besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square (R^2). Berikut hasil yang diperoleh:

Tabel 5.17

Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.384 ^a	.148	.120	2.73010

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: SAP

Pada tabel 5.17 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R^2 sebesar 0,120. Hal ini berarti bahwa variasi Standar Akuntansi pemerintahan sebesar 12% dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sedangkan 88% dijelaskan oleh variabel lainnya.

5.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis tentang hubungan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Akuntabilitas

Hasil pengujian menunjukkan menolak hipotesis bahwa dengan adanya akuntabilitas yang tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan semakin lebih baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah disajikan di web ditolak.

Semakin baik akuntabilitas keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, tidak selalu mengakibatkan lebih baiknya Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkannya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan di web. Sebaliknya buruknya akuntabilitas keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak selalu mengakibatkan buruknya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang disajikan di web. Kondisi ini terjadi karena banyak pengguna laporan keuangan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah setuju bahwa tahapan pengelolaan APBD melibatkan semua unsur-unsur masyarakat, tapi justru mereka beranggapan bahwa pengelolaan APBD tidak disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat dan juga mereka sangat tidak setuju jika APBD itu merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu mengetahuinya.

2. Transparansi

Hasil pengujian menunjukkan menolak bahwa adanya transparansi keuangan kepada publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan semakin lebih baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah disajikan di web.

Semakin seringnya transparansi keuangan kepada publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, tidak serta merta mengakibatkan semakin baiknya Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkannya dalam melakukan penyusunan

laporan keuangan yang disajikan di web. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar para pengguna laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyatakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah akan tetapi sebagian mereka menyatakan bahwa akses untuk memperoleh dokumen publik tentang APBD sulit diperoleh. Selain itu sebagian mereka menyatakan bahwa akses untuk memperoleh dokumen publik tentang APBD sulit diperoleh, tapi kenyatannya mereka juga menyatakan bahwa akses untuk memperoleh dokumen publik tentang APBD sulit diperoleh karena alasan birokratis. Disamping itu mereka menyatakan bahwa musrenbang itu dapat meningkatkan kebijakan transparansi dalam menyusun APBD tetapi justru sebaliknya meskipun suara rakyat / usulan rakyat diakomodasi melalui musrenbang, transparansi publik tentang APBD tetap saja manipulasi. Selain itu mereka beranggapan bahwa transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan / suara rakyat, tetapi kenyataannya malah meskipun suara rakyat / usulan rakyat diakomodasi melalui musrenbang, transparansi publik mengenai APBD tetap saja melakukan manipulasi informasi yang disajikan.

3. Pengawasan

Dari pengujian didapatkan hasil menerima hipotesis bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dalam pengelolaan keuangan di Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan di web. Kondisi ini terjadi karena pengawasan pengelolaan APBD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah secara rutin dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD preventip dan repreventip, yang didukung dengan pernyataan bahwa tujuan penerapan akuntansi, menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban selain itu juga mendukung bahwa laporan keuangan pemerintah disusun netral atau informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini berarti baik buruknya tingkat akuntabilitasnya keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak mempengaruhi diterapkannya atau tidak diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam proses penyusunan laporan keuangan publik.
2. Variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya transparansi keuangan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak mempengaruhi diterapkannya atau tidak diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam proses penyusunan laporan keuangan publik.
3. Variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan di web Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh ketat tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.

6.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan di web.
2. Bagi penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup seluruh stakeholder terhadap laporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya akan menambah beberapa variabel independen dan dependen yang lebih kompleks dalam penelitian ini, karena penelitian ini masih sangat sederhana sekali

DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Ahli Bahasa: Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset
- Pamungkas, Bambang. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggading. Vol 12 No 2
- Republik Indonesia. 2010. *PP No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Umum*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. *UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2006. *UU No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonedis. 2004. *UU No. 1 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. *UU No. 17 tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- Santoso, Singgih. 2001. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business – A Skill Building Approach 4th Ed.* New York: John Wiley & Sons
- Sevilla, Consuelo G. Et.al. 2007. *Reseach Methods*. Rex Printing Company. Quezon City

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH KOMPETENSI (DOSEN PEMULA) TAHUN ANGGARAN 2013

1. Gaji dan Upah								
No	Pelaksana	Jumlah Pelaksana	Jumlah Jam/Minggu	Minggu	Honor/Jam (Rp)	Jumlah (Rp)	Pajak	Ket
1	peneliti utama	1	5	30	6,000	900,000	45,000	PPH 21
2	anggota peneliti	1	5	30	4,000	600,000	36,000	PPH 21
Sub Total						1500,000		
2. Peralatan Penunjang								
No	Nama Alat			Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Ket
1	Flash Disk			2 buah	200,000	400,000		
2	DVD RW			5 buah	7,000	35,000		
3	Kalkulator			1 buah	165,000	165,000		
Sub Total						600,000		
3. Bahan Habis Pakai								
No	Item Pengeluaran			Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Ket
1	Foto kopi kuesioner			100 buah	2,000	200,000		
2	Kertas A4			5 rim	32,000	160,000		
3	Kertas HVS			2 rim	50,000	100,000		
4	Souvenir			100 buah	8,000	800,000		
5	Materai			5 buah	7,000	35,000		
6	Alat Tulis					105,000		
7	Sewa Komputer					500,000		
8	Software SPSS			1 buah	700,000	700,000		
9	Olah data					600,000		
10	Print					700,000		
Sub Total						3900,000		

4. Perjalanan

No	Item Pengeluaran			Jumlah		Ket
1	Perjalanan Diskusi			500,000		
2	Konsumsi Diskusi			700,000		
3	Survey			100,000		
4	Penyebaran Kuesioner			1000,000		
Sub Total				2300,000		

5. Lain - Lain

No	Item Pengeluaran	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Ket
1	Foto kopi proposal	100 lb	200	20,000		
2	Jilid proposal	3 eks	10,000	30,000		
3	Foto kopi laporan kemajuan	250 lb	200	50,000		
4	Jilid laporan kemajuan	3 eks	10,000	30,000		
5	Foto kopi laporan akhir	350 lb	200	70,000		
6	jilid laporan akhir	3 eks	20,000	60,000		
7	PPN			636,364		
Sub Total				896,364		
Total				9196,364		